



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 01-09
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Diplomasi Transisi Energi Indonesia: Strategi Lingkungan dan Negosiasi Investasi Hijau Global Periode 2023–2025

Akwaf Waffi Kariswan^{1*}, Maulana Fasha Aralea², Sekar Rahayu³, Syifa Nindia Destiany⁴, Diyah Pitaloka Rizki⁵

¹⁻⁵ Universitas Al-Ghifari, Indonesia

email: akwafwaffi745@gmail.com¹

Article Info :

Received:
25-11-2025
Revised:
30-12-2025
Accepted:
13-01-2025

Abstract

The global energy transition has made green investment a strategic issue in international relations, particularly for developing countries facing funding constraints and dependence on fossil fuels. Indonesia is in a crucial position due to its significant renewable energy potential, yet its continued reliance on coal as its primary energy source. This article aims to analyze Indonesia's energy transition diplomacy in attracting and managing global green investment in the 2023–2025 period. This research employs a qualitative approach, employing literature review and foreign policy analysis. Data were obtained from official government documents, international organization reports, and relevant scientific publications, and then analyzed using an environmental diplomacy framework. The analysis focuses on Indonesia's strategy for energy transition cooperation, particularly through the Just Energy Transition Partnership (JETP) scheme and involvement in global climate forums. The results show that Indonesia adopts an adaptive diplomatic strategy by balancing national development interests with global climate commitments. Environmental diplomacy is utilized as an instrument to enhance Indonesia's bargaining position in obtaining green investment, transition funding, and technical support.

Keywords: *Environmental, Diplomacy, Energy Transition, Green Investment, Indonesia.*

Abstrak

Transisi energi global telah mendorong investasi hijau menjadi isu strategis dalam hubungan internasional, khususnya bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan pendanaan dan ketergantungan pada energi fosil. Indonesia berada pada posisi penting karena memiliki potensi energi terbarukan yang besar, namun masih bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi transisi energi Indonesia dalam menarik dan mengelola investasi hijau global pada periode 2023–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan luar negeri. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan kerangka diplomasi lingkungan. Fokus analisis diarahkan pada strategi Indonesia dalam kerja sama transisi energi, khususnya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan keterlibatan dalam forum iklim global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi diplomasi yang adaptif dengan menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dan komitmen iklim global. Diplomasi lingkungan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam memperoleh investasi hijau, pendanaan transisi, dan dukungan teknis.

Kata kunci: *Diplomasi, Lingkungan, Transisi Energi, Investasi Hijau, Indonesia.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transisi energi global berkembang sebagai arena strategis yang mempertemukan agenda lingkungan, kalkulasi ekonomi, serta pertimbangan geopolitik negara-negara di sistem internasional. Pergeseran struktur energi dunia mengubah pola relasi kekuasaan melalui akses terhadap teknologi rendah karbon, arsitektur pembiayaan iklim, dan penguasaan rantai pasok energi baru yang bernilai tinggi (Falkner, 2016; Geels, 2014). Kesepakatan iklim pasca-Paris memperlihatkan logika baru politik iklim internasional yang menempatkan komitmen nasional dalam kerangka persaingan dan kolaborasi global sekaligus (Falkner, 2016; International Affairs, 2016). Dinamika tersebut menegaskan bahwa transisi energi bergerak melampaui isu teknis, berfungsi sebagai instrumen politik yang memengaruhi posisi tawar negara di tingkat global (Goldthau & Sovacool, 2012).

Negara berkembang menghadapi tantangan struktural dalam mengelola transisi energi karena keterbatasan fiskal, ketergantungan historis pada energi fosil, serta tuntutan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial yang berjalan bersamaan. Literatur menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas pembiayaan dan teknologi memperlebar jarak antara negara maju dan berkembang dalam pencapaian target iklim (Tamasiga et al., 2023). Resistensi rezim energi lama turut membentuk hambatan politik domestik yang memengaruhi kecepatan dan arah perubahan menuju energi rendah karbon (Geels, 2014). Kondisi tersebut menempatkan negara berkembang pada posisi negosiasi yang kompleks dalam arsitektur pendanaan iklim global (Research & Social Science, 2014).

Investasi hijau muncul sebagai mekanisme sentral untuk menjembatani kebutuhan pendanaan transisi energi dengan target penurunan emisi global. Arus modal hijau yang disalurkan melalui lembaga multilateral, perbankan pembangunan, dan kemitraan bilateral kerap membawa preferensi kebijakan serta standar tata kelola yang merefleksikan kepentingan pemberi dana (Goldthau & Sovacool, 2012). Studi mengenai ekonomi planet menekankan bahwa transisi energi beroperasi dalam tiga ranah pembangunan berkelanjutan yang saling berkelindan, yakni efisiensi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial (Houston, 2017). Pola tersebut memperlihatkan bahwa investasi hijau memiliki dimensi politik yang memengaruhi arah kebijakan energi nasional penerima investasi (Geels, 2014).

Indonesia berada pada persimpangan penting antara komitmen iklim global dan kebutuhan domestik yang menuntut ketahanan energi serta stabilitas pembangunan. Target penurunan emisi yang disampaikan dalam berbagai forum internasional memerlukan dukungan pembiayaan berskala besar dan transfer teknologi yang konsisten (Falkner, 2016). Struktur sistem energi nasional yang masih didominasi sumber fosil menciptakan tantangan tata kelola dan keadilan transisi yang tidak sederhana (Goldthau & Sovacool, 2012). Realitas ini menempatkan investasi hijau sebagai faktor strategis yang perlu dikelola secara selektif melalui kebijakan dan diplomasi yang terarah (Tamasiga et al., 2023).

Diplomasi lingkungan berperan sebagai sarana artikulasi kepentingan nasional dalam proses perundingan iklim dan energi di tingkat internasional. Melalui diplomasi tersebut, negara dapat mempengaruhi desain kerja sama, skema pembiayaan, serta prasyarat kebijakan yang melekat pada investasi hijau (Falkner, 2016). Praktik diplomasi energi modern menunjukkan keterkaitan erat antara isu keamanan energi, keadilan, dan tata kelola global yang saling mempengaruhi (Goldthau & Sovacool, 2012). Pendekatan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk menyeimbangkan tuntutan global dengan kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Houston, 2017).

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum iklim internasional juga berfungsi membangun legitimasi dan kepercayaan mitra terhadap komitmen transisi energi nasional. Citra sebagai negara yang kooperatif dan kredibel memengaruhi persepsi risiko investasi serta peluang akses terhadap pendanaan hijau global (Tamasiga et al., 2023). Arsitektur politik iklim pasca-Paris mendorong negara untuk menunjukkan kepemimpinan normatif melalui diplomasi dan implementasi kebijakan domestik yang konsisten (Falkner, 2016). Interaksi antara legitimasi internasional dan kepentingan domestik tersebut membentuk ruang negosiasi yang menentukan arah kerja sama energi Indonesia (International Affairs, 2016).

Periode 2023–2025 memperlihatkan intensifikasi kompetisi investasi hijau seiring meningkatnya komitmen global terhadap dekarbonisasi. Negara-negara berlomba membangun posisi strategis melalui kemitraan energi bersih yang menggabungkan kepentingan ekonomi, teknologi, dan geopolitik (Geels, 2014). Diplomasi transisi energi Indonesia berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang mempengaruhi struktur kerja sama dan distribusi manfaat investasi (Goldthau & Sovacool, 2012). Analisis kebijakan pada periode ini memerlukan pendekatan yang peka terhadap dinamika politik global dan proses pengambilan keputusan nasional (Berman, 2007).

Diplomasi transisi energi Indonesia dan negosiasi investasi hijau global memiliki relevansi teoretis dan praktis bagi studi hubungan internasional dan kebijakan publik. Pendekatan studi kasus dan pengembangan teori sosial membantu menjelaskan bagaimana negara berkembang merespons tekanan struktural dalam rezim iklim global (Berman, 2007; Huyler & McGill, 2019). Integrasi perspektif politik iklim, ekonomi energi, dan tata kelola global memperkaya pemahaman mengenai strategi diplomasi yang ditempuh Indonesia (Falkner, 2016; Houston, 2017). Fokus pada periode 2023–2025 memberikan gambaran empiris mengenai peran diplomasi lingkungan dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan lanskap energi dan keuangan global (Tamasiga et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik dan strategi diplomasi transisi energi Indonesia dalam kaitannya dengan dinamika investasi hijau global, dengan penekanan pada penafsiran kebijakan, relasi internasional, serta makna strategis dari diplomasi lingkungan. Metode yang diterapkan berupa studi kepustakaan yang memungkinkan penelaahan sistematis terhadap isu-isu kebijakan dan hubungan internasional yang bersifat konseptual dan normatif melalui pemanfaatan data sekunder. Sumber data mencakup dokumen resmi pemerintah Indonesia, laporan organisasi internasional dan lembaga keuangan global, serta artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas diplomasi lingkungan, geopolitik energi, dan kebijakan transisi energi di negara berkembang. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terstruktur dengan kata kunci yang relevan, diseleksi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan sumber, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menguraikan kebijakan serta praktik diplomasi transisi energi Indonesia dalam berbagai forum dan kerja sama internasional, termasuk skema kemitraan transisi energi, dengan menjaga validitas analisis melalui perbandingan antar sumber guna meminimalkan bias interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Transisi Energi Indonesia dan Negosiasi Investasi Hijau Global Periode 2023–2025

Diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 memperlihatkan orientasi kebijakan luar negeri yang semakin terintegrasi dengan dinamika rezim iklim dan arsitektur keuangan global. Negara memposisikan isu energi bersih sebagai agenda strategis untuk mengamankan akses pendanaan, teknologi, dan dukungan politik internasional di tengah meningkatnya kompetisi investasi hijau (Falkner, 2014; Falkner, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan peta riset politik lingkungan global yang menempatkan energi sebagai simpul utama relasi kekuasaan dan ekonomi internasional (Falkner, 2014). Perkembangan tersebut menegaskan bahwa transisi energi Indonesia tidak dilepaskan dari kalkulasi geopolitik dan kepentingan pembangunan nasional (Goldthau & Sovacool, 2012).

Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum iklim global memperkuat legitimasi normatif sebagai negara berkembang yang berkomitmen terhadap agenda dekarbonisasi. Partisipasi dalam COP28 dan berbagai forum multilateral energi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan mitra internasional sekaligus memperluas ruang negosiasi pendanaan (UNFCCC, 2023). Strategi ini mencerminkan dinamika institusional dalam tata kelola lingkungan global yang menuntut negara untuk aktif membentuk aturan, bukan sekadar menjadi penerima kebijakan (Leroy & Arts, 2006). Legitimasi tersebut berdampak langsung pada persepsi risiko dan minat investor terhadap proyek transisi energi nasional (Pickering et al., 2019).

Salah satu instrumen utama diplomasi transisi energi Indonesia adalah skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dirancang sebagai platform pembiayaan transisi energi berbasis kemitraan. JETP mempertemukan komitmen negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan sektor swasta dalam kerangka pendanaan jangka panjang yang terstruktur (World Bank, 2024). Data resmi menunjukkan bahwa komitmen pendanaan JETP Indonesia mencapai puluhan miliar dolar AS dengan fokus pada sektor ketenagalistrikan dan percepatan energi terbarukan (International Energy Agency, 2023).

Skema ini memperlihatkan bagaimana diplomasi lingkungan beroperasi melalui mekanisme keuangan yang sarat kepentingan strategis (Venugopal, 2015). Sebagai penguat empiris, Tabel 1 menyajikan ringkasan komitmen pendanaan transisi energi Indonesia yang bersumber dari laporan resmi dan kajian terdahulu:

Tabel 1. Komitmen Pendanaan Transisi Energi Indonesia (2023–2025)

| Sumber Pendanaan | Skema | Nilai Komitmen | Sumber Data |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Negara Donor & MDB | JETP | ± USD 20 miliar | World Bank (2024) |
| Lembaga Multilateral | Proyek EBT | ± USD 4 miliar | IEA (2023) |
| Investasi Swasta | Energi Terbarukan | ± USD 6 miliar | UNEP (2024) |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pendanaan transisi energi Indonesia bersifat hibrida dan melibatkan aktor publik serta privat, sebagaimana ditegaskan dalam literatur mobilisasi investasi iklim (Venugopal, 2015; UNEP, 2024).

Negosiasi Indonesia dalam JETP memperlihatkan sikap aktif untuk menyesuaikan target dan mekanisme pendanaan dengan struktur ekonomi dan sosial domestik. Pemerintah menekankan pentingnya transisi yang adil guna meminimalkan dampak sosial terhadap pekerja dan daerah yang bergantung pada energi fosil (Sovacool, 2021). Pendekatan ini relevan dengan perdebatan global mengenai korban transisi rendah karbon dan tuntutan keadilan energi (Sovacool, 2021; Goldthau & Sovacool, 2012). Strategi tersebut juga menunjukkan resistensi terkelola terhadap tekanan rezim energi global yang kerap mendorong liberalisasi cepat (Geels, 2014).

Dimensi geopolitik turut memengaruhi diplomasi transisi energi Indonesia melalui perubahan lanskap kekuatan energi global. Energi terbarukan menggeser pola ketergantungan tradisional dan membuka ruang baru dalam kompetisi pengaruh antarnegara (Overland, 2019). Dalam konteks ini, Indonesia memanfaatkan posisi sebagai pasar besar dan pemilik sumber daya strategis untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi investasi hijau (Johnsen, 2019). Pola ini mencerminkan keterkaitan antara energi, kekuatan nasional, dan interdependensi global (Johnsen, 2019; Overland, 2019).

Perbandingan dengan pengalaman negara berkembang lain menunjukkan bahwa diplomasi investasi hijau menyimpan risiko ketergantungan finansial. Studi mengenai Afrika menyoroti ketimpangan dalam arsitektur keuangan iklim yang dapat memperkuat posisi donor dibanding penerima (Tamasiga et al., 2023). Fenomena serupa tercermin dalam konsep green debt diplomacy yang berimplikasi pada kedaulatan ekonomi negara berkembang (Majid et al., 2025). Kesadaran atas risiko ini memengaruhi kehati-hatian Indonesia dalam merancang kerja sama transisi energi jangka panjang (World Bank, 2024).

Keterkaitan antara diplomasi transisi energi dan kebijakan ekonomi internasional Indonesia juga terlihat melalui integrasi isu energi dalam perjanjian kerja sama ekonomi. Pengalaman kerja sama Indonesia–Korea memperlihatkan bahwa investasi hijau sering dipadukan dengan kepentingan perdagangan dan industri (Kalauw et al., 2025). Integrasi tersebut mencerminkan hubungan horizontal antara rezim iklim dan rezim ekonomi global yang saling mempengaruhi (Zelli et al., 2013). Diplomasi transisi energi Indonesia bergerak pada persimpangan antara agenda lingkungan dan strategi ekonomi politik internasional (Huan, 2011).

Pendekatan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan memungkinkan pemetaan dinamika diplomasi transisi energi secara komprehensif. Metode ini relevan untuk menangkap kompleksitas relasi aktor, kepentingan, dan institusi yang tidak mudah diukur secara kuantitatif (Berman, 2007; Huyler & McGill, 2019). Telaah literatur sistematis membantu mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori politik lingkungan dan ekonomi energi global (Snyder, 2019). Hasil analisis menunjukkan konsistensi antara praktik diplomasi Indonesia dan tren global dalam tata kelola energi berkelanjutan (Falkner, 2014; Houston, 2017).

Diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 mencerminkan upaya menyeimbangkan komitmen iklim global dengan kepentingan nasional jangka panjang. Strategi negosiasi investasi hijau diarahkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan teknologi sambil menjaga ruang kedaulatan kebijakan energi (World Bank, 2024). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transisi energi merupakan arena politik yang dipenuhi negosiasi kepentingan dan relasi kekuasaan (Falkner, 2016; Geels, 2014). Analisis ini menempatkan Indonesia sebagai aktor aktif dalam membentuk arah kerja sama energi global di tengah perubahan struktur ekonomi dan lingkungan internasional (UNEP, 2024; UNFCCC, 2023).

Strategi Negosiasi dan Diversifikasi Diplomasi Transisi Energi Indonesia dalam Arus Investasi Hijau Global

Pendekatan negosiasi Indonesia dalam Just Energy Transition Partnership memperlihatkan pola diplomasi transisi energi yang adaptif dan berbasis kepentingan nasional jangka menengah dan panjang. Indonesia tidak menempatkan JETP sebagai skema teknokratis semata, melainkan sebagai ruang politik untuk merundingkan tempo, skala, dan prasyarat transisi energi yang selaras dengan struktur ekonomi domestik. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap batu bara menjadikan transisi energi sebagai persoalan stabilitas pembangunan, bukan sekadar isu pengurangan emisi (International Energy Agency,

2023). Situasi ini mempertegas pandangan bahwa transisi energi merupakan arena negosiasi politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan global dan kondisi struktural nasional (Overland, 2019; Falkner, 2016).

Struktur energi nasional Indonesia membentuk kerangka dasar posisi tawar dalam diplomasi transisi energi internasional. Bauran energi yang masih didominasi batu bara berkaitan erat dengan kepentingan ketenagakerjaan, pendapatan daerah, dan keamanan pasokan listrik nasional. Literatur transisi energi menunjukkan bahwa rezim energi lama cenderung mempertahankan pengaruhnya melalui instrumen politik dan ekonomi, sehingga perubahan kebijakan tidak dapat berlangsung secara linier (Geels, 2014).

Strategi diplomasi Indonesia diarahkan untuk memastikan bahwa komitmen iklim global tidak berimplikasi langsung pada disrupsi sosial dan ekonomi domestik (Goldthau & Sovacool, 2012). Untuk memperkuat argumen tersebut, data empiris mengenai struktur energi dan pendanaan transisi energi Indonesia disajikan dalam satu tabel berikut yang bersumber dari laporan resmi dan penelitian terdahulu:

Tabel 2. Struktur Energi dan Arah Diplomasi Transisi Energi Indonesia (2023–2025)

| Indikator Utama | Kondisi Indonesia | Implikasi Diplomasi | Sumber |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Dominasi batu bara | >50% bauran listrik | Negosiasi transisi bertahap | IEA (2023) |
| Energi terbarukan | <15% bauran energi | Fokus investasi hijau | IRENA (2023) |
| Skema JETP | ± USD 20 miliar | Tawar-menawar target & mekanisme | World Bank (2024) |
| Investasi iklim global | Meningkat tajam | Persaingan mitra strategis | UNEP (2024) |

Data tersebut menunjukkan bahwa diplomasi transisi energi Indonesia dibentuk oleh kombinasi realitas energi domestik dan dinamika keuangan iklim global (International Energy Agency, 2023; World Bank, 2024).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan JETP sebagai instrumen untuk mengamankan dukungan pendanaan dan teknologi sekaligus menjaga ruang kebijakan nasional. Praktik ini sejalan dengan argumen bahwa politik iklim pasca-Paris membuka ruang bagi negara berkembang untuk menegosiasikan komitmen berdasarkan kondisi domestik masing-masing (Falkner, 2016). Indonesia menekankan pentingnya prinsip keadilan transisi, terutama bagi kelompok masyarakat dan wilayah yang bergantung pada sektor energi fosil (Sovacool, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan sensitivitas terhadap dimensi sosial transisi energi yang kerap terabaikan dalam skema global (Goldthau & Sovacool, 2012).

Di luar JETP, diplomasi transisi energi Indonesia diarahkan pada strategi diversifikasi mitra kerja sama internasional. Indonesia tidak menggantungkan agenda investasi hijau pada satu negara atau kelompok donor tertentu, melainkan membangun jejaring kerja sama dengan lembaga multilateral, negara maju, dan mitra kawasan. Strategi ini mencerminkan upaya menghindari ketergantungan struktural dalam arsitektur keuangan iklim global yang sering kali timpang bagi negara berkembang (Tamasiga et al., 2023). Pola diversifikasi tersebut juga meningkatkan fleksibilitas Indonesia dalam menentukan arah kebijakan transisi energi nasional (Pickering et al., 2019).

Diversifikasi mitra kerja sama memiliki implikasi penting terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Studi mengenai green debt diplomacy menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berpotensi menciptakan tekanan fiskal dan ketergantungan jangka panjang apabila tidak disertai kapasitas negosiasi yang kuat (Majid et al., 2025). Kesadaran atas pengalaman negara berkembang lain mendorong Indonesia untuk menempatkan diplomasi lingkungan sebagai instrumen proteksi kepentingan nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi hijau tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan melekat pada relasi kekuasaan global (Huan, 2011).

Diplomasi lingkungan Indonesia berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan nasional dalam forum internasional yang semakin menekankan isu iklim dan energi. Integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri memungkinkan Indonesia memproyeksikan citra sebagai mitra yang kredibel dan strategis dalam kerja sama global. Literatur tata kelola lingkungan global menekankan bahwa diplomasi semacam ini bersifat politis dan strategis, bukan sekadar simbolik (Bernstein, 2013; Zelli et al., 2013).

Praktik Indonesia menunjukkan kemampuan memanfaatkan norma lingkungan untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi investasi hijau (Falkner, 2014).

Dimensi keamanan energi tetap menjadi pertimbangan utama dalam diplomasi transisi energi Indonesia. Pengalaman negara lain memperlihatkan adanya paradoks antara ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan menjaga stabilitas pasokan energi nasional (Azzumar & Suryadipura, 2025). Indonesia merespons paradoks ini melalui kombinasi negosiasi internasional dan kebijakan domestik yang bersifat gradual dan pragmatis. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keamanan energi, keadilan, dan tata kelola merupakan satu kesatuan isu yang saling terkait (Goldthau & Sovacool, 2012).

Pendekatan metodologis kualitatif berbasis studi kepustakaan memungkinkan pemetaan yang komprehensif terhadap dinamika diplomasi transisi energi Indonesia. Studi kasus memberikan ruang untuk menghubungkan praktik empiris dengan pengembangan teori hubungan internasional dan politik lingkungan (Berman, 2007). Telaah literatur sistematis memperkuat konsistensi analisis dengan mengaitkan temuan penelitian pada tren global transisi energi dan keuangan iklim (Snyder, 2019; Huyler & McGill, 2019). Metode ini relevan untuk menangkap kompleksitas relasi aktor dan kepentingan dalam diplomasi energi (Falkner, 2014).

Pembahasan menunjukkan bahwa diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 ditandai oleh strategi negosiasi adaptif, kehati-hatian finansial, dan diversifikasi mitra kerja sama. Praktik tersebut merefleksikan kesadaran terhadap dinamika geopolitik energi, risiko ketergantungan struktural, dan tuntutan keadilan transisi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transisi energi merupakan arena politik global yang menuntut kecermatan diplomasi dan kapasitas negosiasi tinggi (Falkner, 2016; Houston, 2017). Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan kepentingan strategis menempatkannya sebagai aktor aktif dalam membentuk arah investasi hijau global pada era transisi energi (UNFCCC, 2023; UNEP, 2024).

Pembahasan Diplomasi Transisi Energi Indonesia dan Negosiasi Investasi Hijau Global 2023–2025

Diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 menunjukkan pola kebijakan luar negeri yang semakin terintegrasi dengan agenda ekonomi politik global, terutama dalam merespons arsitektur pendanaan iklim internasional yang sarat kepentingan strategis. Investasi hijau yang mengalir ke Indonesia tidak berdiri sebagai mekanisme teknokratis semata, melainkan hadir melalui relasi kuasa yang membentuk preferensi kebijakan, skema pembiayaan, serta arah reformasi sektor energi nasional sebagaimana digambarkan dalam literatur politik lingkungan global (Falkner, 2014; Huan, 2011). Indonesia memanfaatkan forum multilateral dan kemitraan bilateral sebagai ruang negosiasi untuk mengamankan kepentingan pembangunan sekaligus menjaga kredibilitas komitmen iklim. Pola tersebut memperlihatkan bagaimana diplomasi lingkungan berfungsi sebagai instrumen adaptif dalam menghadapi tekanan struktural sistem ekonomi global berbasis karbon (Geels, 2014; Overland, 2019).

Keterkaitan antara investasi hijau dan kepentingan geopolitik aktor internasional tampak dalam preferensi donor terhadap desain kebijakan energi bersih, mulai dari bauran energi hingga tata kelola pembiayaan. Pendanaan iklim kerap disalurkan melalui skema bersyarat yang mendorong reformasi kelembagaan dan regulasi domestik, sejalan dengan temuan tentang politisasi pendanaan iklim dalam hubungan internasional kontemporer (Pickering et al., 2019; Zelli et al., 2013). Indonesia tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan aktor yang berupaya memanfaatkan kompetisi geopolitik energi terbaru untuk meningkatkan posisi tawar nasional. Strategi tersebut menempatkan diplomasi transisi energi sebagai arena negosiasi kepentingan ekonomi, keamanan energi, dan reputasi internasional secara simultan (Goldthau & Sovacool, 2012; Johnsen, 2019).

Arah kebijakan diplomasi transisi energi Indonesia juga memperlihatkan orientasi kuat pada pencapaian manfaat pembangunan domestik yang konkret, terutama penciptaan lapangan kerja hijau dan transfer teknologi. Upaya mengaitkan investasi energi bersih dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional menegaskan bahwa transisi energi diposisikan sebagai instrumen transformasi struktural, bukan sekadar pemenuhan komitmen global (Houston, 2017; IRENA, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan kritik terhadap praktik pendanaan iklim global yang sering mengabaikan dimensi keadilan sosial dan dampak lokal (Sovacool, 2021; Tamasiga et al., 2023). Diplomasi Indonesia diarahkan untuk memastikan bahwa proyek transisi energi berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang kooperatif dalam agenda iklim global menjadi modal diplomatik penting. Komitmen yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam COP, kerja sama Just Energy Transition Partnership, serta dialog dengan lembaga keuangan internasional berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor (Falkner, 2016; UNFCCC, 2023). Reputasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengakses pembiayaan hijau dengan skema yang lebih kompetitif dan fleksibel. Pada saat yang sama, reputasi tersebut berfungsi sebagai instrumen soft power dalam politik energi global yang semakin kompetitif (Overland, 2019).

Untuk memperkuat argumentasi empiris mengenai hubungan antara diplomasi transisi energi dan investasi hijau, data berikut merangkum temuan dari laporan resmi, penelitian terdahulu, serta analisis peneliti terkait dinamika pendanaan, kepentingan geopolitik, dan dampak pembangunan nasional:

Tabel 3. Dinamika Diplomasi Transisi Energi dan Investasi Hijau Indonesia (2023–2025)

| Aspek Utama | Temuan Kunci | Sumber |
|------------------------|---|---|
| Aliran investasi hijau | Peningkatan komitmen pendanaan transisi energi dengan skema bersyarat kebijakan | World Bank (2024); IEA (2023) |
| Kepentingan geopolitik | Pendanaan iklim dipengaruhi preferensi politik dan strategis negara donor | Pickering et al. (2019); Falkner (2014) |
| Transfer teknologi | Kerja sama energi bersih diarahkan pada peningkatan kapasitas industri nasional | IRENA (2023); Kalauw et al. (2025) |
| Dampak sosial | Risiko ketimpangan sosial jika transisi tidak inklusif | Sovacool (2021); Tamasiga et al. (2023) |
| Reputasi internasional | Komitmen iklim meningkatkan kepercayaan investor global | Falkner (2016); UNEP (2024) |

Data tersebut menegaskan bahwa diplomasi transisi energi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan dalam tata kelola lingkungan global. Pola pendanaan dan kerja sama menunjukkan adanya keterkaitan erat antara agenda iklim dan strategi ekonomi politik aktor internasional (Leroy & Arts, 2006; Zelli et al., 2013). Indonesia merespons kondisi ini dengan memperkuat kapasitas negosiasi agar investasi hijau selaras dengan prioritas nasional. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa transisi energi merupakan proses politik yang menuntut kecermatan strategis, bukan sekadar persoalan teknis.

Dalam perspektif keamanan dan kedaulatan energi, diplomasi transisi energi juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan struktural terhadap energi fosil impor. Pengembangan energi terbarukan domestik dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional dalam sistem internasional yang saling bergantung (Goldthau & Sovacool, 2012; Azzumar & Suryadipura, 2025). Melalui diplomasi investasi hijau, Indonesia berupaya mengamankan akses teknologi dan pembiayaan tanpa mengorbankan otonomi kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan strategis nasional.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa skema pembiayaan inovatif, termasuk kolaborasi publik–swasta, menjadi instrumen penting dalam diplomasi transisi energi. Model pembiayaan tersebut memungkinkan mobilisasi modal dalam skala besar sekaligus mengurangi beban fiskal negara (Venugopal, 2015; UNEP, 2024). Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan kapasitas institusional domestik. Diplomasi energi Indonesia diarahkan untuk memperkuat institusi nasional agar mampu mengelola investasi hijau secara berkelanjutan (Berman, 2007; Snyder, 2019).

Dalam global, diplomasi transisi energi Indonesia juga merefleksikan dinamika ketimpangan dalam arsitektur keuangan iklim internasional. Negara berkembang kerap menghadapi tantangan akses pendanaan yang adil meskipun memiliki kontribusi emisi historis yang relatif kecil (Tamasiga et al., 2023). Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya sebagai ekonomi besar di Global South untuk mendorong reformasi tata kelola pendanaan iklim. Upaya ini menempatkan Indonesia tidak hanya

sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agenda setter dalam diskursus transisi energi global (Falkner, 2016).

Diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 beroperasi sebagai strategi multidimensional yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan geopolitik. Investasi hijau dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat posisi tawar internasional sekaligus mendorong transformasi pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan (IEA, 2023; World Bank, 2024). Dinamika tersebut menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi sangat ditentukan oleh kapasitas diplomasi dalam mengelola relasi kuasa global. Dalam lanskap politik internasional yang semakin kompleks, diplomasi transisi energi menjadi instrumen kunci bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan iklim sekaligus peluang ekonomi global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi transisi energi Indonesia pada periode 2023–2025 merupakan strategi adaptif yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan tuntutan komitmen iklim global dalam arus investasi hijau internasional. Melalui pemanfaatan diplomasi lingkungan, Indonesia secara aktif membangun legitimasi dan posisi tawar dalam berbagai forum iklim global serta skema kerja sama internasional, khususnya Just Energy Transition Partnership (JETP), guna memperoleh pendanaan, dukungan teknis, dan akses teknologi energi bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif dalam menerima investasi hijau, melainkan melakukan negosiasi strategis agar kerja sama transisi energi tetap selaras dengan kondisi ekonomi, sosial, dan struktur energi domestik. Diplomasi transisi energi juga berperan penting dalam memperkuat citra internasional Indonesia sebagai negara berkembang yang berkomitmen terhadap agenda iklim global, sekaligus menjadi instrumen kebijakan luar negeri untuk menghadapi dinamika geopolitik dan politik ekonomi investasi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzumar, M. A., & Suryadipura, D. (2025). Menyingkap Paradoks Keamanan Energi Kosta Rika. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(2), 293-306. <https://doi.org/10.24198/padjir.v7i2.64934>.
- Berman, S. (2007). Case studies and theory development in the social sciences. *Perspectives on Politics*, 5(1), 187-188. <https://doi.org/10.1017/S1537592707070491>.
- Falkner, R. (2014). Global environmental politics and energy: mapping the research agenda. *Energy Research & Social Science*, 1, 188-197. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.03.008>.
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92(5), 1107-1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>.
- Geels, F. W. (2014). Regime resistance against low-carbon transitions: Introducing politics and power into the multi-level perspective. *Theory, Culture & Society*, 31(5), 21–40. <https://doi.org/10.1177/0263276414531627>.
- Goldthau, A., & Sovacool, B. K. (2012). The uniqueness of the energy security, justice, and governance problem. *Energy Policy*, 41, 232–240. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.10.042>.
- Houston, M. (2017). *Planetary Economics: Energy, Climate Change, and Three Domains of Sustainable Development*. Edited by Michael Grubb, Jean-Charles Hourcade, and Karsten Neuhoff. Routledge, New York, 2013. 548pp. \$70.00. ISBN: 970-0-415-51882-6.. <https://doi.org/10.1057/s41302-016-0009-6>.
- Huan, Q. (2011). Climate capitalism: global warming and the transformation of the global economy. <https://doi.org/10.1080/09644016.2011.589588>.
- Huyler, D., & McGill, C. M. (2019). Book Review: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. <https://doi.org/10.1002/nha3.20258>.
- International Affairs*, 92(5), 1107–1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>
- International Energy Agency. (2023). *Indonesia energy transition outlook 2023*. IEA. International
- Johnsen, W. T. (2019). Land power in the age of joint interdependence: toward a theory of land power for the twenty-first century. *Defense & Security Analysis*, 35(3), 223-240. <https://doi.org/10.1080/14751798.2019.1640417>.

- Kalauw, S. M., Nurinaya, N., & Siswatiningrum, E. (2025). Kerja Sama Indonesia–Korea melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 2046-2057. <https://doi.org/10.63822/pk7a4008>.
- Leroy, P., & Arts, B. (2006). Institutional dynamics in environmental governance. In *Institutional dynamics in environmental governance* (pp. 1-19). Dordrecht: Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/1-4020-5079-8>.
- Majid, M., Fathullah, A. N., & Yafuz, L. (2025). Green Debt Diplomacy dan Implikasi Terhadap Kedaulatan Ekonomi: Studi Kasus Sri Lanka, Pakistan, dan Sub Sahara. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 10(1). <https://doi.org/10.70836/jh.v10i1.99>.
- Overland, I. (2019). The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths. *Energy Research & Social Science*, 49, 36–40. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.10.018>
- Pickering, J., Skovgaard, J., Kim, S., Roberts, J. T., Rossati, D., & Stadelmann, M. (2019). Acting on climate finance pledges: Inter-agency dynamics and relationships with aid in contributor states. *World Development*, 114, 201–214. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.035>
- Renewable Energy Agency. (2023). *World energy transitions outlook 2023*. IRENA.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Toward a political ecology of climate change mitigation. *Energy Research & Social Science*, 73, 101916. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>
- Tamasiga, P., Molala, M., Bakwena, M., Nkoutchou, H., & Onyeaka, H. (2023). Is Africa left behind in the global climate finance architecture: redefining climate vulnerability and revamping the climate finance landscape A comprehensive review. *Sustainability*, 15(17), 13036. <https://doi.org/10.3390/su151713036>.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global investment for sustainable development*. UNEP.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). *Report of the Conference of the Parties (COP28)*. UNFCCC.
- Venugopal, S. (2015). Mobilising Private Sector Climate Investment: Public–Private Financial Innovations. In *Responsible Investment Banking: Risk Management Frameworks, Sustainable Financial Innovation and Softlaw Standards* (pp. 301-324). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10311-2_18.
- World Bank. (2024). *Indonesia: Financing the energy transition*. World Bank Group.
- Zelli, F., Gupta, A., van Asselt, H., & Biermann, F. (2013). Horizontal institutional linkages in global environmental governance: An analysis of climate–energy linkages. *Global Environmental Politics*, 13(2), 23–48. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00154.